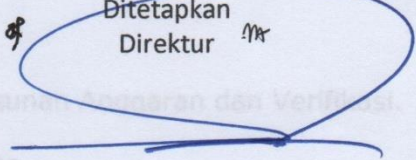




Pengelolaan Piutang

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB	No. DOKUMEN 047/01/09/01/2018	No. REVISI 01	HALAMAN 1/2
Standar Operasional Prosedur	Tanggal Terbit 02 - 01 - 2018 Tanggal Berlaku 02 - 01 - 2018	 Ditetapkan Direktur dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19740621 200212 1 007	

PENGERTIAN	Merupakan salah satu jenis transaksi akuntansi yang berkaitan dengan penagihan terhadap konsumen/pasien/lembaga jaminan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta atau pihak lain dalam bentuk uang.
RUANG LINGKUP	Ketentuan ini meliputi seluruh jumlah klaim piutang yang telah diajukan kepada orang, badan atau instansi pemerintah yang telah melakukan kegiatan yang terkait pembiayaan RSUD Provinsi NTB.
TUJUAN	Terciptanya pengelolaan piutang pendapatan kas BLUD RSUD Provinsi NTB yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dalam laporan Neraca RSUD Provinsi NTB.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pengelolaan piutang pendapatan kas BLUD RSUD Provinsi NTB berpedoman pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. 2. Instalasi/bagian yang terkait dengan klaim piutang dapat mengajukan klaim pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Instalasi Jaminan Pembiayaan Kesehatan (JPK). 3. Pengajuan klaim piutang didasarkan jumlah laporan klaim dari instalasi/unit kerja/bagian/bidang untuk diajukan kepada orang, badan atau instansi yang terkait dengan klaim piutang.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi atau unit kerja dalam hal ini RSUD Provinsi NTB mengajukan permintaan penagihan klaim pembayaran piutang kepada orang, badan, atau instansi yang terkait dengan pelayanan pada RSUD Provinsi NTB setelah mendapatkan persetujuan Direktur. 2. Permintaan pembayaran klaim piutang dilakukan dengan pengumpulan dokumen klaim yang telah diverifikasi dan

	<p>disetujui Direktur RSUD Provinsi NTB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Permintaan pembayaran klaim piutang dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Provinsi NTB. 4. Dokumen/bukti klaim piutang dapat disiapkan baik dari orang, badan atau instansi terkait. 5. Rekap pendapatan klaim piutang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur dan dimasukkan serta dicatat dalam laporan Neraca Piutang.
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Umum dan Keuangan 3. Kabag Keuangan 4. Kasubag Mobilisasi Dana, Penyusunan Anggaran dan Verifikasi. 5. Bendahara Pengeluaran 6. Pembantu Bendahara Pengeluaran 7. Petugas Akuntansi dan verifikasi 8. Bagian Keuangan 9. PPTK
FORM YANG DIGUNAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jumlah rekap permintaan klaim piutang 2. Surat-surat/dokumen permintaan klaim piutang 3. Bukti Laporan Neraca Piutang